BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minat Islam dan kecenderungan masyarakat terhadap wacana ekonomi cukup beragam, bahkan dapat dikatakan jika animo masyarakat terhadap jasa ekonomi islam semakin hari semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya lembaga keuangan-bank maupun nonbank-berbasis syariah dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa dari lembaga-lembaga tersebut. Meskipun ekonomi islam membahas berbagai aspek ekonomi, perbankan syariah (Islamic Banking) saat ini dianggap sebagai karakteristik penentu sistem ekonomi Islam.¹

Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh industri keuangan syariah ke depan nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang

¹ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 4

menggembirakan.² Diantaranya berdirinya BRI syariah, Mandiri Syariah dan lain sebagainya.

Meskipun institusi keuangan itu selalu berevolusi, kebangkitan keuangan Islam tidak dapat dikatakan sebagai semata-mata proses evolusi dari industri keuangan yang ada. Harus dipahami bahwa pandangan hidup muslim (*worldview*) yang melihat Islam sebagai sebuah perangkat aturan dari perilaku untuk seluruh area kehidupan termasuk aspek ekonomi, merupakan sebuah kekuatan pendorong (*driving force*) atas kelahiran industri keuangan Islam. Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri keuangan yang menjalankan aktivitas berbasis Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*).³

Perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari'at Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran ini untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang

² Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia", Jurnal Kordinat, Vol. VIII 1, April 2006, 14

³ Abdullah M. Noman, "Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, (2003), 5

penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat. Dalam konteks inilah, Fiqh Muamalah dituntut dinamis dalam arti, tidak hanya sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam kelas, tetapi dapat diaplikasikan dalam praktik muamalah di lembaga keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah sesuai tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat muslim di Indonesia saat ini.⁴

Umat Islam dalam mengembangkan usaha ekonomi, telah diperintahkan oleh Allah agar berusaha atau berikhtiar sekuat tenaga dan semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala fasilitas dan potensi yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup menjadi lebih layak dan sejajar dengan orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Hal ini karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum tanpa adanya upaya orang atau kaum tersebut untuk merubah nasib mereka sendiri.⁵

Untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu, posisi DPS itu sendiri secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi LKS, maka model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip syariah. DPS dipercaya

⁴ Zainul Anwar Aan, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Se-Kabupaten Jepara* ; (Jurnal Ekonomi 2016, ISSN 2407-9189), 256-257.

⁵ Zainul Anwar Aan, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Se-Kabupaten Jepara* ; Jurnal Ekonomi 2016, ISSN 2407-9189, 256.

untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syariah patuh pada aturan dan prinsip Islam.⁶

Didunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya.⁷

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah.⁸ Dewan pengawas syariah berada di bawah Dewan syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah institusi dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga ini bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) / Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum islam (syariah) untuk

⁶ Zainul Anwar Aan, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Se-Kabupaten Jepara* ; (Jurnal Ekonomi 2016, ISSN 2407-9189), 258.

⁷ Karnoen A.Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 2.

⁸ mam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), 156.

dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya.⁹ Keluarnya Fatwa MUI tentang Dewan Syariah Nasional tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan bank syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, diantaranya adalah transaksi Foreign Exchange Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance* dengan mengambil studi pada BMT Al-Hikmah Semesta dan Koperasi Wanita Mentari, serta hambatan yang dihadapi DPS dalam menjalankan tugasnya dan solusi yang telah diupayakan, dengan judul “ Studi Komparasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan *Sharia Compliance* (Studi pada Baitul Maal Wat Tamwil Alhikmah Semesta Cab. Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara).

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang keliru atau kesalahfahaman dalam menginterpretasikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskannya sebagai berikut :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk

⁹ Arista Nurul Shofanisa, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Akta Pembiayaan Notaris dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (*Sharia compliance*)”, Jurnal Yuridika, (Surabaya) Vol. 32 Nomor 2, 2017, 3.

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰

2. Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah adalah pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah, memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.¹¹
3. Penerapan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan artinya adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹²
4. *Sharia Compliance*
Sharia Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah. Pemahaman masyarakat tentang keunikan dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigaan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan, Jakarta, 1995, hlm. 78.

¹¹ Mey Saramawati Dedhi Ana dan Tarmizi Lubis Ahmad, *Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia*; Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2 No.2, 2014, hal. 113-114.

¹² Departemen Pendidikan, *Op. Cit.*, hlm. 264.

¹³ Mey Saramawati Dedhi Ana dan Tarmizi Lubis Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 116.

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara?
2. Bagaimanakah gambaran mengenai penerapan *sharia compliance* pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara?
3. Bagaimanakah pelaksanaan tugas DPS dalam Pengawasan aspek syariah pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan *sharia compliance* di pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan perannya terhadap pengawasan aspek syariah pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.
3. Untuk mengetahui gambaran mengenai penerapan *sharia compliance* di pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Akademik, khususnya Ekonomi Syariah penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan tentang pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam pada khususnya mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan *sharia compliance* di lembaga keuangan

- mikro syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-hikmah Semesta dan Koperasi Wanita Mentari.
2. Bagi Almamater, penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan IAIN Kudus, khususnya dalam penerapan *sharia complaince* pada lembaga keuangan syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-hikmah Semesta dan Koperasi Wanita Mentari.
 3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah dan membuka wawasan pengetahuan tentang mengembangkan Hukum Ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Bagian awal meliputi : halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian isi terbagi menjadi beberapa bab meliputi :

1. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari enam sub bab meliputi : Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari tiga sub bab meliputi : Deskripsi Pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari beberapa sub bab meliputi :Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisa Data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari tiga sub bab meliputi : Gambaran Umum Objek Penelitian, kedua tentang hasil penelitian, yang ketiga mengenai pembahasan.

5. Bab V : Penutup

Terdiri dari dua sub bab meliputi : Kesimpulan, Saran.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka,lampiran dan lain-lain.